



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUMARI**
2. Jabatan : **PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**
3. NHK : **460886**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **591.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 331 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 312.000.000
2. Tanah Seluas 273 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 51.000.000
3. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 56.000.000
4. Tanah Seluas 867 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 75.500.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 234 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 96.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **27.200.000**

1. MOTOR, SUZUKI MOTOR BEBEK SOLO Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SOLO Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000
3. MOTOR, YAMAHA SCOOTER Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.300.000
4. MOTOR, YAMAHA SCOOTER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **42.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **412.296**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	660.612.296
III. HUTANG	Rp.	27.743.384
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	632.868.912

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.